


Peningkatan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Nelayan Skala Kecil

Fitri Sari Dewi^{1*}, Jamal²

^{1,2} Program Studi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Universitas Ibnu Sina, Lubuk Baja-Kota, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia.

E-mail: fitri.sari@uis.ac.id

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3700>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 October 2025

Revised: 25 October 2025

Accepted: 25 November 2025

Kata kunci:

Kebijakan, keselamatan, kesehatan, kerja, jaminan, nelayan, kecil

Keywords:

Policy, safety, health, work, guarantee, fishermen, small



ABSTRACT

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja pada nelayan, antara lain dipengaruhi oleh pemahaman tentang perlunya bekerja dengan selamat dan sehat karena besarnya pengaruh lingkungan kerja nelayan yang menghadapi tantangan lingkungan alam dalam aktivitas menangkap hasil laut dan dukungan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagai upaya untuk membantu pencegahan dan pengendalian dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja dan kepesertaan nelayan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari implementasi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja pada nelayan skala kecil. Metode pelaksanaan program pengabdian meliputi edukasi wawasan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan urgensi jaminan ketenagakerjaan nelayan, forum grup diskusi (FGD) serta komitmen untuk menjadi peserta jaminan ketenagakerjaan. Program ini menghasilkan perilaku positif dari nelayan tentang pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja nelayan meliputi pengetahuan identifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko kerja serta penggunaan alat pelindung diri serta partisipasi nelayan dalam kepesertaan jaminan ketenagakerjaan yang dilakukan secara mandiri.

Occupational safety and health policies for fishermen are influenced by, among others, an understanding of the need to work safely and healthily due to the significant influence of the fishermen's work environment, which faces challenges from the natural environment in their marine fishing activities, and support for social security for employment, as an effort to help prevent and control the risk of work accidents and occupational diseases. The purpose of this community service is to increase awareness of occupational safety and health and fishermen's participation in the social security program for employment as part of the implementation of occupational safety and health policies for small-scale fishermen. The implementation method of the community service program includes education on occupational safety and health and the urgency of fishermen's employment security, discussion group forums (FGDs) and a commitment to become participants in the employment security. This program results in positive behavior from fishermen about the importance of occupational safety and health aspects in the fishermen's work environment, including knowledge of identifying potential hazards and controlling work risks, as well as the use of personal protective equipment, and fishermen's participation in independent employment security participation.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Fitri Sari Dewi, et al (2025). Peningkatan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Nelayan Skala Kecil 4(2) 10996- 11001 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3700>

PENDAHULUAN

Aktivitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dilakukan di lingkungan laut dengan pekerjaan yang berisiko mengakibatkan cedera dan *fatality* di kapal penangkap ikan yang umum terjadi (Rasmussen dan Ahsan, 2018). Kesejahteraan kaum nelayan dan menjadi penyebab nelayan dalam kemiskinan antara lain karena sebagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang memang belum kondusif untuk suatu kemajuan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2022, masyarakat di wilayah pesisir yang masuk kategori kemiskinan ekstrem masih sebanyak 3,9 juta jiwa. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir mencapai 4,19 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan ekstrem nasional yang sebesar 4 persen. Nelayan laut di Indonesia masih banyak termasuk sebagai nelayan artisanal atau skala kecil, atau dapat disebut juga nelayan tradisional. Dari segi pendidikan nelayan, rata-rata berpendidikan rendah atau tamatan sekolah dasar dan menengah pertama (Kinseng *et al.*, 2019).

Dari segi regulasi dan kebijakan terkait upaya perlindungan nelayan, terdapat peraturan Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk untuk nelayan, khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional yang termasuk ke dalam pekerjaan di sektor informal.

Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal (Bappenas, 2009). Oleh karena itu, upaya untuk melindungi dan memberdayakan nelayan pada perikanan skala kecil sangat perlu, karena keterbatasan nelayan pada akses pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi.

Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam Bab X, Pasal 60 sampai Pasal 64 membahas mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Terdapat Instruksi Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, yang isinya adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan.

Penangkapan ikan adalah aktivitas komersial perikanan yang dipraktikkan di seluruh dunia (Bene *et al.*, 2007). Perikanan nelayan skala kecil memiliki karakteristik kompleks yang dibutuhkan dalam memperhitungkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang intrinsik di setiap daerah. Definisi perikanan skala-kecil dan ruang lingkupnya dalam beberapa hasil penelitian menunjukkan kaitan dan hubungan antara berbagai aspek yaitu, sosial, budaya, ekonomi, ekologis (lingkungan), kesehatan, tata kelola atau kelembagaan serta regulasi, hukum dan kebijakan. Selain itu kebijakan juga perlu menganalisis pemangku kepentingan dan mengelola interaksi kompleks antara ekosistem laut dan kesehatan serta kesejahteraan nelayan, termasuk juga peranan kelembagaan dan keberlanjutan sosial dalam pengelolaan perikanan lokal.

Dalam aktivitas pekerjaan nelayan, penilaian risiko diperlukan di lingkungan tempat kerja dan memastikan bahwa tempat kerja aman dan sehat untuk semua orang yang terlibat agar dapat mencegah atau melindungi pekerja. Penilaian risiko adalah alat untuk membantu mengidentifikasi tren dan bahaya keselamatan utama yang mungkin ada dalam pekerjaan nelayan di sektor perikanan. Penilaian risiko dapat digunakan oleh nelayan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan (Lambert *et al.*, 2015). Pengendalian risiko yang terakhir atau didalam hirarki pengendalian risiko letaknya paling bawah adalah pengendalian yang menggunakan alat pelindung diri (APD). Alat pelindung diri merupakan pilihan terakhir dalam pengendalian risiko karena APD bukan untuk mencegah kecelakaan tetapi hanya untuk mengurangi keparahan kecelakaan. Keselamatan dan kesehatan kerja pada nelayan sangat penting untuk mendukung produktivitas nelayan dalam melakukan pekerjaannya.

Bidang pengabdian masyarakat yang akan dilakukan adalah kegiatan pembinaan dan peningkatan aspek keselamatan dan kesehatan kerja di dalam implementasi kebijakan dan regulasi terkait keselamatan, kesehatan kerja dan kesejahteraan nelayan. Tujuan pelaksanaan kegiatan dan fokus pengabdian kepada masyarakat adalah untuk melakukan upaya pembinaan kepada kelompok nelayan

tradisional dan skala kecil mengenai implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja nelayan berdasarkan kebijakan regulasi untuk aspek keselamatan, kesehatan kerja dan kesejahteraan nelayan.

Pemilihan lokasi pengabdian masyarakat berada di Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah kepulauan dan 95% luas wilayah adalah lautan. Luasnya mencapai 8.201,72 kilometer persegi atau sekitar 0,43 persen dari luas Indonesia. Populasi penduduk yakni 56,47 persen atau sekitar 1,1 juta jiwa. Mayoritas masyarakat pesisir adalah kelompok masyarakat nelayan tradisional dan nelayan skala kecil.

METODE

Jenis penelitian dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dalam bentuk kegiatan forum grup diskusi yang membahas tentang jenis potensi bahaya dan pengendalian risiko dari lingkungan kerja nelayan serta jenis alat pelindung diri dalam pekerjaan nelayan. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk memperoleh data mengenai pengetahuan nelayan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja nelayan dan tingkat partisipasi sebagai kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.

Pelaksanaan program meliputi tahap persiapan yaitu perijinan kegiatan pengabdian pada masyarakat nelayan, kelengkapan instrumen penelitian, dan bahan materi edukasi; tahap kegiatan meliputi kegiatan forum grup diskusi, wawancara dan materi edukasi; dan tahap penutup serta evaluasi kegiatan. Persiapan dan pelaksanaan program pengabdian dilaksanakan di kampung nelayan, Kecamatan Nongsa, Kota Batam dari bulan Juni sampai Oktober tahun 2025.

Subjek penelitian adalah nelayan tangkap pada perikanan skala kecil yang berjumlah 30 orang dengan jenis kelamin seluruhnya adalah laki-laki. Penentuan subjek penelitian dengan teknik purposif yaitu data nelayan diperoleh dari RT/RW setempat dan ketua kelompok nelayan. Instrumen penelitian meliputi daftar pertanyaan forum grup diskusi, kuesioner dan lembar check list.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian masyarakat ini dilakukan setelah adanya penelitian mengenai aspek keselamatan dan kesehatan kerja nelayan dan jaminan ketenagakerjaan. Hasil program pengabdian masyarakat dilalui dengan tahapan-tahapan berikut ini:

1. Tahap awal observasi dan survei

Pada tahap ini, dilakukan kegiatan observasi dan survei awal mengenai keadaan lingkungan kerja nelayan yang meliputi bagaimana aspek perilaku nelayan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja nelayan.

2. Tahap persiapan

Tahap ini dilakukan persiapan mengenai ijin lokasi dan administrasi untuk kegiatan program pengabdian masyarakat dengan pihak RT/RW dan kelompok nelayan di kecamatan. Selain itu dilakukan persiapan mengenai instrument kegiatan, persiapan materi edukasi dan bantuan paket kebutuhan pokok nelayan.

3. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti dari program pengabdian masyarakat yang dilakukan, terdiri dari pelaksanaan forum grup diskusi yaitu membahas tentang jenis potensi bahaya dan pengendalian risiko dari lingkungan kerja nelayan serta jenis alat pelindung diri yang dimiliki dalam pekerjaan nelayan. Selain itu diberikan kuesioner mengenai pengetahuan nelayan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja nelayan dan tingkat partisipasi sebagai kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.

Kemudian, dilanjutkan dengan pemaparan materi edukasi kepada nelayan mengenai pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada nelayan, materi jenis dari alat pelindung diri yang memenuhi standar lingkungan kerja dan pemahaman mengenai peranan dari kepesertaan jaminan ketenagakerjaan. Tahap pelaksanaan program ditutup dengan pemberian bantuan paket kebutuhan pokok untuk nelayan.



Gambar 1. Fokus Grup Diskusi



Gambar 2. Pengisian Kuesioner Nelayan



Gambar 3. Pemaparan Materi Edukasi Nelayan

Dari hasil fokus grup diskusi dihasilkan kesimpulan dan pembahasan bahwa jenis potensi bahaya dan pengendalian risiko dari lingkungan kerja nelayan serta jenis alat pelindung diri yang dimiliki dalam pekerjaan nelayan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Fokus Grup Diskusi Kelompok Nelayan

No.	Variabel	Hasil Diskusi
1.	Jenis potensi bahaya	Identifikasi bahaya kerja adalah berasal dari lingkungan kerja nelayan yang berada di laut. Bahaya yang mengancam adalah jika menghadapi cuaca ekstrim yang sering terjadi jika sudah memasuki musim hujan, dikenal dengan istilah musim angin utara. Selain itu nelayan dihadapi dengan bahaya biologi berupa tertusuk duri ikan atau melepuh. Masalah ergonomi seperti keluhan sakit punggung, sakit pinggang dan pegal-pegal juga dihadapi nelayan karena aktivitas mengangkat mesin kapal dan menarik jaring ikan.
2.	Pengendalian risiko	Nelayan tidak memaksakan diri untuk melaut, apabila menghadapi cuaca ekstrim karena dapat menimbulkan risiko jatuh ke laut atau tenggelam dan kapal rusak. Untuk aspek biologi, seperti tertusuk duri ikan atau melepuh, menimbulkan gangguan kerja untuk nelayan ketika

- menangkap ikan karena ada bagian tangan yang sakit. Diperlukan kehati-hatian nelayan dalam menangkap tangkapan laut. Adapun masalah ergonomi, mengakibatkan nelayan mengalami gangguan kesehatan berupa rasa sakit pada beberapa area tubuh seperti punggung, pinggang, bahu dan tangan serta mengakibatkan kelelahan kerja. Nelayan dapat mengurangi risiko aspek ergonomi dengan memperhatikan postur tubuh ketika mengangkat dan menarik agar kondisi tubuh lebih nyaman dan aman.
3. Alat pelindung diri
- Nelayan tidak memiliki alat pelindung diri yang lengkap karena keterbatasan ekonomi untuk membeli alat pelindung diri dan beberapa penggunaan alat tersebut dianggap mengurangi pergerakan nelayan, seperti sarung tangan, sepatu boot, dan *life jacket*. Jenis alat pelindung diri yang rata-rata dimiliki nelayan adalah topi, senter, pelampung dan *life jacket*. Saran yang disampaikan kepada nelayan adalah untuk menyediakan dan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap agar pekerjaan nelayan lebih aman dan sehat, seperti kotak P3K dan kacamata.

Dari kuesioner mengenai pengetahuan nelayan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja nelayan dan tingkat partisipasi sebagai kepesertaan jaminan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Kuesioner Nelayan

No.	Variabel	Sub Variabel	Jumlah (%)
1.	Keselamatan dan kesehatan kerja nelayan	1. Kecelakaan kerja	
		- Pernah	30 (100%)
		- Tidak pernah	0 (0%)
		2. Penyakit akibat kerja	
- Pernah	30 (100%)		
- Tidak pernah	0 (0%)		
2.	Peserta jaminan ketenagakerjaan	1. Ya	2 (6,7%)
		2. Tidak	28 (93,3%)

Dari hasil kuesioner nelayan diperoleh bahwa semua nelayan pernah mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja karena banyak dan tingginya risiko dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja nelayan yang bekerja di lingkungan alam yaitu laut. Adapun dari kepesertaan jaminan ketenagakerjaan nelayan, diperoleh data bahwa nelayan masih sedikit yang secara mandiri untuk mendaftarkan sebagai peserta dikarenakan masih menunggu peran pemerintah daerah untuk memberikan jaminan ketenagakerjaan secara gratis untuk nelayan skala kecil. Selain itu, kepesertaan yang sedikit diakibatkan masih banyak nelayan yang belum mengetahui tentang informasi dan manfaat sebagai peserta jaminan ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dapat melindungi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk nelayan.

Setelah dilakukan pemaparan materi edukasi mengenai aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada nelayan, materi jenis dari alat pelindung diri yang memenuhi standar lingkungan kerja dan pemahaman mengenai peranan dari kepesertaan jaminan ketenagakerjaan, di dapatkan adanya peningkatan dan pemahaman nelayan untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam aktivitas nelayan, khususnya saat kegiatan menangkap tangkapan ikan di laut. Nelayan juga akan berupaya melengkapi alat pelindung diri sebagai upaya pencegahan dan mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian, nelayan telah mempunyai komitmen untuk dapat menjadi peserta jaminan ketenagakerjaan walaupun sebagai peserta mandiri yang artinya, setiap bulan nelayan akan menyisihkan pendapatan untuk membayar iuran, namun di harapkan pemerintah daerah lebih meningkatkan peserta jaminan ketenagakerjaan untuk nelayan yang alokasinya dari anggaran daerah karena nelayan skala kecil termasuk dalam kelompok rentan, marginal dan ekonomi lemah.

4. Tahap evaluasi

Tahap ini merupakan tahap penutupan yang berisi tentang rekomendasi program pengabdian selanjutnya untuk mendorong peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja nelayan, salah satunya adalah kebijakan mengenai urgensinya kepesertaan jaminan ketenagakerjaan untuk nelayan skala kecil.

SIMPULAN

Kesimpulan dari program pengabdian ini adalah diperolehnya kondisi aspek keselamatan dan kesehatan kerja nelayan yang masih berisiko tinggi mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja karena lingkungan kerja nelayan adalah aktivitas menangkap ikan di alam yaitu laut. Nelayan masih terbatas di dalam melengkapi alat pelindung diri ketika bekerja dan tidak ingin pekerjaannya terganggu dan tidak nyaman karena alat pelindung diri yang dipakai. Adapun pemahaman mengenai pentingnya untuk menjadi peserta jaminan ketenagakerjaan sudah ditanggapi dengan baik oleh nelayan dan nelayan masih mampu untuk menjadi peserta jaminan ketenagakerjaan karena iurannya masih bias terjangkau. Diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan dengan meningkatkan alokasi anggaran daerah untuk membantu nelayan skala kecil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ibnu Sina yang telah memberikan dukungan pendanaan. Terimakasih juga disampaikan kepada Keompok Nelayan Tangkap Kecamatan Nongsa, Batam atas partisipasi aktif, kerjasama, dan peran serta nelayan untuk menerima dan mendukung kegiatan pengabdian masyarakat. Terima kasih juga disampaikan kepada civitas akademisi dari perguruan tinggi dan peran tokoh masyarakat setempat yang hadir dan mendukung kelancaran program pengabdian masyarakat.

REFERENSI

- Bappenas. (2009). *Kajian evaluasi pembangunan sektoral: Peran sektor informal sebagai katup pengaman masalah ketenagakerjaan*. Jakarta: Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bene, C., G. Macfadyen., & E. H. Allison. (2007). *Increasing the contribution of small scale fisheries to poverty alleviation and food security*. Food and Agriculture Organization (FAO) Fisheries Technical Paper No. 481. FAO, Rome, Italy.
- FAO. (2019). *Pedoman Sukarela Untuk Melindungi Perikanan Skala Kecil*.
- ILO. (1998). *Encyclopedia of Occupational Health and Safety*. Volume 1-4. 4th edition. Stellman, Jeanne Mager (ed). Geneva.
- ILO. (2013). *Keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja*. Jakarta.
- Kinseng, R.A., Mahmud, A., Hamdani, A., & Hidayati, H.N. (2019). Challenges to the sustainability of small-scale fishers livelihood in Banyuwangi regency, East Java, Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 325, 012008.
- Lambert, D.M., E.M. Thunberg, R.G. Felthoven, J.M. Lincoln, & W.S. Patrick. (2015). *Guidance on fishing vessel risk assessments and accounting for safety at sea in fishery management design*. U.S. Dept. of Commer., NOAA. NOAA Technical Memorandum NMFS OSF-2, 56 p.
- Rasmussen, H.B., & Ahsan, D. (2018). Injuries and fatalities in Danish commercial fishing fleet in 1998–2016. *Safety*, 4 (2), 13.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1970). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.